

SALINAN

NOMOR 29, 2014

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA MALANG TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang berfungsi sebagai acuan untuk menyusun Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kota Malang;
 - b. bahwa dalam rangka membangun Kota Malang diperlukan sebuah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kota Malang Tahun 2014-2025 agar memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kota Malang Tahun 2013 - 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Nomor: PER-06/M.EKON/08/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA MALANG TAHUN 2014-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Malang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang.
5. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi adalah upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan perekonomian Kota Malang.
6. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi yang selanjutnya disingkat MP3E adalah dokumen yang berisikan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kota Malang untuk periode 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005 – 2025.
7. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi yang selanjutnya disingkat KP3E Kota Malang adalah Komite Pelaksana MP3E Kota Malang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya MP3E Kota Malang adalah sebagai pedoman dalam rangka menyusun perencanaan dan pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kota Malang agar memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur.

Pasal 3

Tujuan MP3E Kota Malang adalah adanya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kota Malang untuk periode 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 4

Sasaran MP3E Kota Malang adalah:

- a. adanya terobosan strategi dan kebijakan yang titik berat pendekatannya pada solusi, bukan pada pendekatan masalah yang dihadapi dalam Percepatan dan Perluasan Pembangunanann Ekonomi (MP3E) Kota Malang;
- b. percepatan transformasi ekonomi dengan pendekatan peningkatan *value added*, mendorong investasi, mengintegrasikan sektoral dan regional serta memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya; dan
- c. keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam upaya Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3E) Kota Malang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup MP3E Kota Malang meliputi:

- a. pengembangan koridor ekonomi sektor industri dan jasa;
- b. memperkuat konektivitas dengan melakukan perluasan pembangunan ekonomi Kota Malang yang berfokus pada

penguatan industri dan jasa terutama sektor pendidikan dan jasa; dan

- c. mempercepat kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dilakukan dengan pengembangan modal manusia berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi secara terencana dan sistematis.

Pasal 6

Pembangunan koridor ekonomi Kota Malang dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah. Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis masing-masing wilayah, maka sebagai upaya meningkatkan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kota Malang ditetapkan 4 (empat) koridor ekonomi yaitu sebagai berikut:

1. Koridor Ekonomi Tengah (Satu), mempunyai tema Sentra Perdagangan dan Jasa-jasa Kota Malang.
2. Koridor Ekonomi Timur-Selatan (Dua), mempunyai tema Pendorong Industri Mikro Kecil dan Menengah.
3. Koridor Ekonomi Barat (Tiga), mempunyai tema Pengembangan IPTEK dan Industri Kreatif.
4. Koridor Ekonomi Penunjang (Empat), mempunyai tema Pusat Wisata.

BAB IV

MASTERPLAN

Pasal 7

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3E) Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Walikota ini

BAB V

KOORDINASI PELAKSANAAN MP3E KOTA MALANG

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan MP3E Kota Malang perlu dibentuk KP3E Kota Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) KP3E Kota Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP3E Kota Malang;
- b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan MP3E Kota Malang;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MP3E Kota Malang; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas KP3E Kota Malang kepada Walikota Malang melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Agustus 2014
WALIKOTA MALANG,
ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 29

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 29 TAHUN 2014
 TENTANG
 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN
 PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI
 KOTA MALANG TAHUN 2014-2025

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI
 KOTA MALANG 2013-2025

VISI	MISI	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN PRIORITAS	PERIODE			SKPD
						2013-2015	2016-2020	2021-2025	
Kota Mandiri	• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	• Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	• Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah agar lebih proporsional, efisien dan efektif, dengan kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan	• Meningkatnya profesionalisme birokrat dalam melayani masyarakat.	• Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. • Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan kepemimpinan				Bagian Hukum
				• Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.					Bagian Pemerintahan
		• Pemanfaatan <i>e-government</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan	• Pembangunan, peningkatan dan pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana perkantoran pemerintah yang berbasis teknologi informasi, dengan kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan	• Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis IT	• Pengembangan dan pendayagunaan jaringan telekomunikasi				Dinas Komunikasi dan Informatika

VISI	MISI	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN PRIORITAS	PERIODE			SKPD
						2013-2015	2016-2020	2021-2025	
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar dan pelayanan umum 	<ul style="list-style-type: none"> Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Peningkatan kualitas pelayanan umum dan operasional Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan perizinan terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan standar pelayanan minimal di setiap instansi pelayanan publik, guna mendorong peningkatan pendayagunaan sumber daya aparatur. Mendorong pengembangan mutu pelayanan publik melalui penerapan standar mutu manajemen ISO. Pelayanan terpadu dengan memanfaatkan IT dalam bentuk: <i>e-government</i>, <i>e-procurement</i>, <i>e-business</i> dan <i>cyber law</i> untuk menghasilkan pelayanan publik prima yang lebih cepat, baik, dan murah. 				Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan Kelurahan Dinas Komunikasi dan Informatika
		<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat peran masyarakat sipil (<i>civil society</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan ,pengawasan dan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan publik, serta pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan mekanisme konsultasi partisipasi publik sebagai sarana dalam proses penyusunan kebijakan. 				Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Bagian Hukum

VISI	MISI	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN PRIORITAS	PERIODE			SKPD
						2013-2015	2016-2020	2021-2025	
					<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan masyarakat. 				
	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif dan Berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Sektor Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggiatan kesadaran kepada dunia usaha untuk menggunakan bahan baku lokal untuk menunjang industri keratif Kota Malang • Peningkatan iklim industri yang kondusif melalui penyederhaan ijin dan jaminan pemerintah • Peningkatan kemitraan dan fasilitasi eksibisi IKM • Peningkatan iklim industri yang kondusif 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya suatu produksi barang berbahan lokal guna mendukung Industri kreatif di Kota Malang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penumbuhan dan pengembangan industri berorientasi ekspor yang memanfaatkan sumber daya lokal • Pengembangan dan diversifikasi bahan baku industri • Pengembangan Industri Kreatif berbasis kearifan lokal Malang • Pengembangan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah, dan cepat • Malang <i>Export and Exhibition Center</i> • Fasilitasi pameran produk-produk unggulan Kota Malang dalam berbagai <i>event</i>. • pengembangan 				Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Bagian Perekonomian

VISI	MISI	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN PRIORITAS	PERIODE			SKPD
						2013-2015	2016-2020	2021-2025	
			<p>melalui penyederhaan ijin dan jaminan pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan standarisasi produk • Peningkatan promosi daerah untuk meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri • Reformulasi pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sector informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi di tingkat kelurahan • Peningkatan dan sinkronisasi kebijakan antar level pemerintahan dalam dunia industri 		<p>pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah, dan cepat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pelatihan standarisasi produk dan hak paten. • Pemberian insentif dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran tentang Hak Keyaan Intelektual (HKI) • Peningkatan kualitas informasi dan pengembangan jaringan informasi berkaitan dengan potensi kota • Penyediaan dukungan untuk mengembangkan usaha produktif melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, serta bimbingan teknis manajemen • Melakukan koordinasi dan singkronisasi berkaitan dengan kebijakan 				

VISI	MISI	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN PRIORITAS	PERIODE			SKPD
						2013-2015	2016-2020	2021-2025	
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan mikro di tingkat kecamatan atau kelurahan • Pengembangan teknologi agribisnis (makanan dan minuman) • Pengembangan Agribisnis di Kecamatan Kedung Kandang 		<p>pengembangan industry dengan kelembagaan terkait baik di tingkat pusat dan provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses pelaku UMKM terhadap permodalan dan kredit melalui pengembangan sistem perbankan alternatif. • Pengembangan kredit usaha mikro tanpa agunan. • Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan penanganan pasca panen, pengolahan hasil melalui teknologi yang mudah dan murah • Fasilitasi pengembangan agrobisnis melalui kemitraan masyarakat petani dan pemilik modal sebagai wujud CSR untuk peningkatan kesejahteraan petani 				

VISI	MISI	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN PRIORITAS	PERIODE			SKPD
						2013-2015	2016-2020	2021-2025	
		<ul style="list-style-type: none"> Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Sektor Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan daya tarik wisata unggulan Kota Malang secara terpadu dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Taman Rekreasi Kota Pembangunan Pasar Seni Pembangunan Taman anggrek Pengembangan potensi ROLAK Penyediaan pusat informasi wisata (<i>tourism information centre</i>) Kota Malang Pembangunan Pusat Jajanan Malang Pembangunan Malang <i>Design Center</i> Festival Malang Kembali Skala Internasional Pembangunan <i>Lampion Garden</i> Pembangunan Malang <i>Night Zoo</i> Optimalisasi pameran yang bertaraf nasional dan internasional. 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Komunikasi dan Informatika Badan pelayanan perijinan Terpadu

VISI	MISI	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN PRIORITAS	PERIODE			SKPD
						2013-2015	2016-2020	2021-2025	
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi di sektor industri pariwisata, melalui penyederhanaan perijinan, dan insentif perpajakan, dan kemudahan lainnya bagi investor • Peningkatan peran serta masyarakat, biro/agen travel untuk mengembangkan paket wisata terpadu dan kompetitif, 		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas kerjasama pemasaran antar daerah, propinsi dan negara. • Pertumbuhan dan pengembangan investasi pada industri pariwisata • Fasilitasi pemasaran paket wisata dan jaringan distribusinya. • Fasilitasi usaha kepariwisataan 				
		<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Sektor Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama dengan berbagai perusahaan dan organisasi lainnya dalam meningkatkan sektor persewaan dan jasa perusahaan • Peningkatan inovasi hiburan dan kebudayaan atraktif dan kreatif untuk meningkatkan jasa hiburan dan kebudayaan 		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Malang <i>Tourism Center</i> • Pembangunan Malang <i>Hall Convention Center</i> • Pengembangan produk pariwisata dari aset warisan budaya dan potensi alam yang berdaya 				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Bagian Perekonomian

VISI	MISI	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN PRIORITAS	PERIODE			SKPD
						2013-2015	2016-2020	2021-2025	
			<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan layanan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal 		<ul style="list-style-type: none"> saing Pembuatan lembaga ekonomi non formal 				
Tangguh	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan kualitas pendidikan, sehingga tersedia SDM yang berdaya saing tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran institusi pendidikan termasuk perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program vokasi. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup (PBKH) atau life skill berdasarkan paradigma <i>Broad Based Education (BBE)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan program vokasi untuk meningkatkan skill masyarakat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya program vokasi untuk meningkatkan skill masyarakat. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong peran Perguruan Tinggi dalam peningkatan pengetahuan dan skill masyarakat Pembangunan Taman Pintar Fasilitasi penelitian dan pengembangan riset dasar dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan 				Dinas Pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran dan pelatihan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya 	<ul style="list-style-type: none"> Pembelajaran dan pelatihan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya masyarakat melek dan teknologi informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan taman sebagai taman teknologi dan taman pintar Perumahan sebagai perkampungan ICT Pembangunan <i>Malang Book Center</i> 				Dinas Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas PU, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan

VISI	MISI	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN PRIORITAS	PERIODE			SKPD
						2013-2015	2016-2020	2021-2025	
					<ul style="list-style-type: none"> • <i>International Education Training Center</i> 				
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran serta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultan usaha melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas pelayanannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas pelayanannya bagi peningkatan peran serta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya sistem insentif, kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas pelayanannya bagi peningkatan peran serta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif bagi dunia usaha yang berperan aktif dalam peningkatan pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat 				Dinas Komunikasi dan Informatika
Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sarana dan prasarana guna menumbuhkan wirausaha baru, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan keunggulan kompetitif khususnya di sektor pariwisata dan industri kreatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan, pemeliharaan, dan peningkatan secara rutin sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang kondisinya kurang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pembangunan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya infrastruktur dasar yang lebih merata dan berstandar internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur jalan utama • Pembangunan jalan lingkaran barat dan lingkaran timur • Pembangunan Jalan tembus untuk meningkatkan fungsi jalan dari lokal menjadi kolektor sekunder 				Dinas PU, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Dinas Perhubungan Badan Lingkungan Hidup
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan pemerataan energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan pemerataan energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya energi dan terwujudnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur 				Dinas Kebersihan

VISI	MISI	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN PRIORITAS	PERIODE			SKPD
						2013-2015	2016-2020	2021-2025	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur jaringan dan penyediaan pembangkit listrik menggunakan sumber energi alternatif. • Mengoptimalkan penyediaan listrik untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat • Pembinaan pengelolaan air tanah • Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi untuk dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengawasan hemat energi • Penyediaan listrik yang optimal bagi industri dan rumah tangga • Penginventarisiran potensi air tanah • Pemberdayaan, penggalian, dan pengawasan pemanfaatan air tanah • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi di berbagai kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • kelurahan mandiri energi • Terwujudnya pembangkit listrik bersumber energi alternatif bagi industri dan rumah tangga • Terwujudnya berbagai infrastruktur listrik untuk kebutuhan industri, rumah tangga dan masyarakat • Tersedianya data potensi air tanah • Optimalnya pemberdayaan air tanah • Tersedianya sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi yang berstandar internasional di diseluruh wilayah Kota Malang • Tersedianya hasil penelitian bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • jaringan & penyediaan pembangkit listrik energi alternatif di setiap kelurahan • Pengembangan pembangkit listrik skala kecil melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) • Pengembangan pembangkit listrik skala kecil melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) • ZAMP (Zona Air Minum Prima) • Pembangunan reservoir /tandon PDAM • Pembangunan kargo dan peti kemas • Pembangunan infrastuktur 				<ul style="list-style-type: none"> • dan Pertamanan • Perusahaan Listrik Negara • Perusahaan Air Minum Daerah • Dinas Kesehatan • Dinas Pasar

VISI	MISI	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN PRIORITAS	PERIODE			SKPD
						2013-2015	2016-2020	2021-2025	
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sarana dan prasarana khusus yang berstandar internasional • Menyempurnakan masterplan tata 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana khusus yang berstandar internasional • Revisi masterplan tata ruang dan wilayah agar 	<ul style="list-style-type: none"> transportasi, komunikasi dan informasi dengan standar pelayanan internasional • Tersedianya sarana dan prasarana khusus berstandar internasional • Tersusunnya masterplan tata 	<ul style="list-style-type: none"> transportasi penambahan rute angkutan umum di wilayah Kecamatan Kedungkandang • Pembangunan <i>computer rute</i> Kepanjeng-Lawang • Pengadaan Bus Kota Jalan Lingkar • TRANS MAYA • Bus khusus pelajar dan mahasiswa rute terhubung dengan kantong-kantong sarana pendidikan • Pembangunan rumah sakit pendidikan berstandar internasional • <i>International Malang Library</i> • <i>Hotspot</i> di semua publik area • Bandara Abdurrahman Saleh menjadi bandara internasional • Pembangunan Zona Pedestrian 				

VISI	MISI	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN PRIORITAS	PERIODE			SKPD
						2013-2015	2016-2020	2021-2025	
		<p>ruang dan wilayah agar berwawasan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keindahan dan kenyamanan lingkungan 	<p>berwawasan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana keindahan kota 	<p>ruang dan wilayah yang berwawasan lingkungan sesuai standar internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Kota Malang yang indah dan nyaman 	<p>Kawasan CBD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona Pedestrian Kawasan Pasar Besar Kota Malang • Penataan kawasan Pasar Gadang • Pengembangan ruang terbuka hijau • Pengembangan RTH sebagai zona pengaman pada jalur KA • Penetapan kawasan konservasi sesuai karakteristik kawasan sebagai pendukung ikon kota • Pengembangan pengelolaan dan peningkatan TPS • Pengembangan TPA dengan <i>sistem sanitary landfill</i> • Pengembangan taman teknologi yang dilengkapi dengan fasilitas <i>gazebo</i> dan <i>shelter</i> • Pembangunan <i>eco park</i> 				

VISI	MISI	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN PRIORITAS	PERIODE			SKPD
						2013-2015	2016-2020	2021-2025	
					<ul style="list-style-type: none"> • Taman hijau di puncak gedung • Penyediaan jalur hijau/jalur tengah • Refungsionalisasi dan pengamanan jalur utama sesuai klasifikasinya • Pengembangan dan revitalisasi hutan kota yang relatif masih banyak lahan yang belum terbangun 				
Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan masyarakat Kota Malang Yang Sejahtera. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kredit usaha rakyat bagi penduduk miskin, dan pembentukan lembaga keuangan mikro untuk melayani kebutuhan modal usaha • Peningkatan fasilitas kredit bagi UKM melalui model kemitraan dan penjaminan dari pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses modal/kredit bagi penduduk miskin • Fasilitasi dan penjamin kredit bagi UKM dengan model kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya lembaga keuangan mikro untuk memberikan kredit bagi penduduk miskin • Terwujudnya fasilitasi dan penjamin kredit bagi UMKM dengan model kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro sampai tingkat kelurahan, untuk pengembangan usaha • Pemberian jaminan kredit bagi usaha-usaha produktif • Pemberdayaan usaha rakyat melalui akses permodalan (pinjaman lunak) yang bebas agunan 				Dinas Sosial Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pertanian

VISI	MISI	KEBIJAKAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN PRIORITAS	PERIODE			SKPD
						2013-2015	2016-2020	2021-2025	
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani melalui penyuluhan/sekolah pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya fasilitasi, bimbingan dan pembinaan petani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan kelompok petani untuk melakukan pelatihan ketrampilan pengembangan usaha dalam rangka penanganan Kemiskinan 				

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019